

BAB IV
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005–2025

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Manggarai Tahun 2005–2025 ialah visi pembangunannya yakni:

MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL
DAN BERKELANJUTAN

Sebagai parameter pencapaian visi Kabupaten Manggarai tersebut di atas maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1) Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Manggarai, yang ditandai oleh:

- a) Pertumbuhan ekonomi lokal yang tinggi, berkualitas dan berkesinambungan;
- b) Pengurangan jumlah KK miskin secara bertahap melalui program pengentasan kemiskinan sesuai kriteria MDGs;
- c) Perlindungan sosial secara merata bagi anak terlantar, anak jalanan, orang cacat, lanjut usia, korban bencana alam dan bencana sosial lainnya;
- d) Peningkatan penertiban mendirikan bangunan melalui pemberian Ijin Prinsip Lokasi (IPL) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai Tata Ruang;
- e) Pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja yang dapat diukur melalui jumlah dan jenis usaha pada sektor formal dan informal, diversifikasi usaha, peningkatan produktivitas, pencegahan perdagangan perempuan, penetapan upah minimum, pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan, peningkatan mediasi masalah ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan jamsostek dan peningkatan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3);
- f) Penanganan penanggulangan bencana alam melalui mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- g) Pembangunan perekonomian desa/kelurahan yang dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas kelembagaan perekonomian desa, peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi, peningkatan agribisnis, agroindustri, agrowisata dan *home industry* serta peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat desa;
- h) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)
- i) Peningkatan pengembangan kepariwisataan; dan
- j) Peningkatan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan ketersediaan dan keteraksesan, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal; sarana dan prasarana transportasi laut; sarana dan prasarana transportasi udara; sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi; sarana dan prasarana air minum bersih dan sanitasi; sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan; maupun sarana dan prasarana telekomunikasi dan telematika bagi pelayanan publik.

2) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Manggarai yang ditandai oleh:

- a) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b) Terkendalinya pertumbuhan penduduk yang dapat diukur melalui tingkat kelahiran, kematian dan migrasi;
- c) Kesehatan masyarakat secara merata yang diukur melalui jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, jumlah dan mutu tenaga kesehatan, jumlah penduduk yang sakit, Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak, angka penderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan reproduksi, perubahan perilaku hidup sehat dan peningkatan akses ke pusat-pusat pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan air minum bersih dan sanitasi;
- d) Peningkatan kualitas pendidikan secara merata dan memadai pada setiap jenjang pendidikan yang diukur melalui kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, tingkat kelulusan siswa dan nilai kelulusan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf penduduk;
- e) Peningkatan kepemilikan identitas pribadi penduduk;

- f) Pemerataan kesempatan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- g) Pembangunan bidang kepemudaan dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam cabang olah raga prestasi melalui peningkatan jumlah organisasi kepemudaan, jumlah organisasi olah raga, jumlah kegiatan olah raga, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung/stadion olah raga, pencapaian prestasi setiap cabang olah raga, peningkatan olah raga usia dini;
- h) Penguatan kelembagaan adat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Manggarai yang dapat diukur melalui upaya pemberdayaan lembaga adat, pelestarian budaya lokal daerah, pengembangan seni dan budaya daerah; dan
- i) Harmonisasi kehidupan umat beragama yang diukur melalui peningkatan kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB).

3) Terwujudnya Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Keamanan dan Ketertiban Sosial, yang ditandai oleh:

- a) Pembenahan subsistem hukum daerah untuk menunjang hukum positif, yang dapat diukur melalui jumlah dan kualitas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dan penjabaran peraturan perundangan lebih tinggi;
- b) Birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien yang ditandai oleh pembentukan struktur organisasi yang miskin struktur kaya fungsi, penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- c) Kepastian kepemilikan hak atas tanah melalui program sertifikasi;
- d) Peningkatan penataan aset-aset daerah;
- e) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diukur melalui menurunnya KKN, transparansi informasi dan pelayanan publik, akuntabilitas, pemberantasan mafia peradilan serta meningkatnya pengawasan;
- f) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diukur melalui menurunnya konflik dan angka kriminalitas serta meningkatnya kesadaran hukum;
- g) Peningkatan partisipasi politik masyarakat yang diukur melalui keikutsertaan dalam pesta demokrasi tingkat nasional dan daerah;

- h) peningkatan pengawasan dan pencegahan perdagangan manusia (*human trafficking*);
- i) peningkatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diukur melalui menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya perlindungan terhadap korban kekerasan dan kesadaran masyarakat akan HAM.

4) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang, yang ditandai oleh:

- a) pembangunan berwawasan lingkungan yang diukur melalui pembangunan berdasarkan AMDAL; menurunnya kasus *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal sand mining*, okupasi kawasan hutan, penertiban tambang liar; penataan tempat pembuangan sampah (TPA); dan tersedianya kawasan hijau, kawasan penyanggah (*buffer zone*);
- b) peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan yang diukur melalui peningkatan penghijauan dan reboisasi pada kawasan kritis, sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c) peningkatan pengelolaan sumberdaya air terpadu yang diukur melalui pembentukan wadah pengelolaan sumber daya air; pelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan, konsumsi, peningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air;
- d) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan yang diukur melalui meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, terpeliharanya sumber-sumber kekayaan di laut, pengembangan komoditi kawasan pesisir, pengelolaan ekosistem pesisir laut dan konservasi laut;
- e) Kota Ruteng menjadi Kota Molas (Kota Asri) yang diukur melalui adanya taman kota, kawasan hijau dan alun-alun kota; dan
- f) konsolidasi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kecamatan yang diukur melalui tertib mendirikan bangunan dengan memiliki IPL/IMB, pembangunan berbasis tata ruang dan wilayah sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan.

5) Terwujudnya Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri), yang ditandai oleh:

- a) Peningkatan pelayanan pemerintahan menuju pembentukan kota madya;
- b) peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan yang diukur melalui Peningkatan Tipe Rumah Sakit Umum Ruteng dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan prioritas Jurusan Keperawatan dan Kebidanan di Kabupaten Manggarai;
- c) peningkatan kualitas dan kuantitas bidang Pendidikan yang diukur melalui pembangunan Universitas atau perluasan/penambahan Jurusan pada Perguruan Tinggi yang sudah ada, menjadikan Kota Ruteng sebagai Kota Jasa Pendidikan/Kota Pelajar;
- d) peningkatan perluasan industri dan Perdagangan yang diukur melalui pembangunan sarana dan prasarana industri dan Perdagangan; dan
- e) Kota Ruteng menjadi Kota Molas (Kota Asri) berdasarkan filosofi yakni kesempurnaan budi dan lingkungan, yang diukur melalui (i) pembangunan taman kota dengan tanaman hias dan kayu pelindung spesies lokal seperti kayu Manis (Ndingar), Munting Rona (untuk dataran tinggi), kayu Labe Hang dan sebagainya berdasarkan blok wilayah; (ii) Pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk pusat-pusat pembangunan; (iii) Revitalisasi kampung-kampung tradisional agar tetap ada sebagai pusat budaya; (iv) tersedianya taman kota, kawasan hijau dan alun-alun kota.

Untuk mencapai masyarakat Manggarai yang sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan, maka strategi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Manggarai selama kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai berikut :

4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005–2025

4.1.1. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Penataan Kelembagaan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Manggarai melalui:

- a) Pembangunan ekonomi makro pada tingkat lokal diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis ekonomi nasional dan fasilitasi pengembangan

investasi swasta sebagai motor penggerak ekonomi menggantikan peran belanja/investasi pemerintah.

- b) Perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan berwawasan lingkungan.
- c) Pengintegrasian sektor-sektor pembangunan sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan tersier; serta aktivitas yang berpihak pada peningkatan pertumbuhan, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan berwawasan lingkungan.
- d) Revitalisasi sektor primer yang dimotori oleh pertanian yang mampu mengaktualisasikan kebijakan nasional dan provinsi sesuai dengan karakteristik dan potensi spesifik pembangunan pertanian dan aspek sosial budaya Kabupaten Manggarai.
- e) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan melalui pola pendampingan secara berkesinambungan untuk optimalisasi subsektor tanaman pangan dan hortikultura.
- f) Penerapan teknik budi daya perkebunan: intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, pengembangan industri perbenihan, pengembangan kawasan agribisnis perkebunan, penguatan sistem perlindungan perkebunan, perbaikan sistem pengolahan produk perkebunan dan pengembangan agroindustri pedesaan.
- g) Pembangunan sub sektor peternakan yang diarahkan pada: (i) peningkatan kualitas SDM aparatur dan petani peternak; (ii) peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan; (iii) peningkatan produksi dan produktivitas ternak; (iv) pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; (v) pembangunan industri pengolahan hasil ternak; (vi) pengembangan pusat pembibitan ternak; (vii) pembangunan industri pengolahan hasil ternak; (viii) pengembangan jaringan pemasaran ternak; (ix) pengembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya ternak sebagai sarana hiburan/aset wisata (pacuan kuda).
- h) Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang diarahkan pada: (i) peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pendapatan masyarakat; (iii) penyebaran jenis dan jumlah benih unggul pada Balai Benih Ikan (BBI) dan masyarakat; (iv) pengembangan pusat pembibitan ikan; (v) peningkatan manajemen pengelolaan BBI (vi) pengembangan kualitas pengolahan hasil dan pemasaran; (vii) penertiban *illegal fishing*, rehabilitasi dan konservasi sumber daya perikanan pada

perairan umum, pesisir dan pulau kecil; (viii) pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan modal dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan; (ix) promosi tentang pentingnya laut bagi peningkatan lapangan kerja, pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sebagai obyek wisata bahari melalui Gerakan Masuk Laut (GEMALA).

- i) Pembangunan sektor kehutanan yang diarahkan pada pengembangan hutan rakyat dengan pola pemberdayaan, peningkatan penertiban perambah hutan, rekonstruksi tapal batas kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, pengamanan hutan secara terpadu dan penegakan hukum, pengembangan industri pengolahan hasil hutan, pembangunan kebun induk benih tanaman kehutanan dan pengembangan hutan kota dan *ekowisata*.
- j) Pembangunan sektor Koperasi dan UKM yang diarahkan pada tercapainya masyarakat Kabupaten Manggarai yang mandiri berkoperasi dan berusaha melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perkoperasian dan UKM, penguatan modal perkoperasian dan UKM, pembinaan kelembagaan usaha koperasi dan UKM, peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan menengah bagi keluarga-keluarga miskin, penguatan lembaga koperasi wanita dan pengembangan kemitrausahaan.
- k) Pembangunan sektor perdagangan yang diarahkan pada peningkatan mutu komoditi, pengembangan perdagangan antarpulau dan ekspor, peningkatan jaringan informasi pasar, peningkatan sumber daya pelaku usaha, perlindungan konsumen dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
- l) Pembangunan sektor industri yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, agroindustri, meubelair, industri logam dan konveksi.
- m) Pembangunan sektor kelistrikan yang diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana listrik melalui pengurangan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, perkantoran dan sektor jasa lainnya dengan memanfaatkan panas bumi Ulumbu.
- n) Pembangunan sektor perhubungan yang diarahkan pada: (i) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal untuk memperlancar arus orang dan barang yang berbasis tata ruang dan berwawasan ekologis; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas kendaraan melalui pengembangan sistem

transportasi yang ramah lingkungan dan penetapan standar kualitas laik jalan kendaraan; (iii) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut melalui peningkatan fasilitas pelabuhan Kedindi Reok, pelabuhan rakyat, tambat labuh dan pembangunan pelabuhan baru berskala nasional di Robek; (iv) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi udara dengan membangun bandara baru melalui kerja sama 3 (tiga) Kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan membangun kerjasama dengan pengelola jasa penerbangan; (v) peningkatan fasilitas bandara Frans Sales Lega; (vi) peningkatan pengamanan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- o) Pembangunan sarana dan prasarana umum yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan, pembukaan jalan baru, peningkatan jalan, pembangunan dan preservasi jembatan, peningkatan peralatan, pembangunan irigasi, penataan pemukiman penduduk, penataan lingkungan perkotaan, rekonstruksi drainase perkotaan, pembuatan kanal, peningkatan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peningkatan izin usaha jasa konstruksi, peningkatan pembangunan jaringan air minum bersih perkotaan dan pedesaan.
- p) Pembangunan bidang ketenagakerjaan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, optimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK).
- q) Pembangunan Pariwisata yang diarahkan pada penataan dan pengembangan obyek wisata potensial; promosi pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pengembangan wisata budaya, wisata alam dan wisata religius; peningkatan SDM pamong wisata; pembinaan masyarakat sadar wisata; dan kerja sama antar pelaku wisata.
- r) Pembangunan sektor keuangan dan kapital yang diarahkan pada optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan; peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah; peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan; peningkatan investasi; dan optimalisasi pemberdayaan badan usaha milik daerah.

4.1.2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Manggarai melalui:

- a) Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk membentuk masyarakat mandiri dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan global. Perubahan

kualitas dimaksud terlihat melalui Indeks Pembangunan Manusia Manggarai yang mencerminkan kualitas rata-rata Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf dan pendapatan per kapita masyarakat.

- b) Pembangunan pendidikan yang diarahkan melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik; peningkatan mutu lembaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peningkatan mutu lulusan; pemberdayaan Kepala Sekolah; penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa; pengembangan metologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan berwirausaha; keterpaduan sistem evaluasi pendidikan; penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) bidang pendidikan; penyediaan buku teks murah; rasionalisasi pendanaan pendidikan; penelitian dan pengabdian masyarakat; pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri; penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan formal pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi; reformasi birokrasi pendidikan; koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah bidang pendidikan; akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, daerah tertinggal dan rawan bencana; dan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- c) Pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar; perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan kesadaran berperilaku hidup sehat terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi dan anak-anak, dengan berpedoman pada prinsip perikemanusiaan, keadilan dan pemerataan, pemberdayaan dan kemandirian. Di samping itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya tenaga kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan status RSUD Ruteng dari Tipe C ke Tipe B; manajemen dan kemitraan kesehatan; dan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
- d) Peningkatan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan Gerakan Keluarga Berencana, pemeliharaan kesehatan reproduksi menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, persebaran penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e) Pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil yang diarahkan pada upaya-upaya kepastian kepemilikan identitas diri; pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil; pencatatan kelahiran tepat waktu; penertiban identitas diri; pembangunan SIAK *on-line*; pemutahiran dan validasi kependudukan; pengolahan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten, pelayanan pencatatan nikah, cerai dan rujukan.

- f) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan anak, penurunan eksploitasi, kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak dengan melakukan penguatan kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender dan anak.
- g) Pembangunan kepemudaan dan olah raga yang diarahkan pada pemberdayaan generasi muda dan kelompok olah raga, pembinaan olah raga berprestasi, peningkatan olah raga usia dini, peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dan pemberdayaan organisasi kesiswaan.
- h) Pembangunan budaya yang diarahkan untuk memantapkan jati diri daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang berpotensi memperkaya kebudayaan nasional.
- i) Pembangunan agama yang diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan; meningkatkan kerukunan hidup antar-umat beragama sehingga tercipta sikap toleransi dan hubungan yang harmonis antar kelompok dalam masyarakat.

4.1.3. Mewujudkan Penataan Birokrasi, Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan dan Ketertiban Sosial melalui:

- a) Pembangunan subsistem hukum daerah yang diarahkan untuk menunjang hukum positif dengan mendorong peran hukum adat yang efektif memberi penyelesaian kasus-kasus bercorak khas daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan HAM. Subsistem hukum daerah diharapkan juga memberi kontribusi bagi peningkatan PAD, terciptanya keadilan dan kepastian hukum, pengawasan pelaksanaan pembangunan, mencegah kebocoran anggaran pembangunan, dan mendorong percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- b) Penataan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk menghasilkan struktur birokrasi yang efektif dan efisien (miskin struktur kaya fungsi); peningkatan kompetensi aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan; pengelolaan urusan hak-hak kepegawaian/aparatur secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat aturan; perekrutan

CPNS disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi dengan tetap memprioritaskan tenaga kejuruan, sarjana dan pasca sarjana.

- c) Pembangunan keamanan dan ketertiban yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan upaya persuasif, penegakan hukum dan kerja sama operasi penertiban.
- d) Pembangunan politik yang diarahkan untuk mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesadaran politik, peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai pelopor pembangunan.

4.1.4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan ekologis dan berbasis tata ruang melalui:

- a) Pembangunan sumber daya alam yang diarahkan pada optimalisasi, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya tambang yang berbasis ekologis dan tata ruang; mendorong investasi; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan potensi tambang; menjamin kepastian hukum bagi para investor dan masyarakat; peningkatan penyebaran informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan; pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertambangan.
- b) Pembangunan Lingkungan hidup yang diarahkan pada: (i) peningkatan perlindungan kegiatan rehabilitasi, konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan; (ii) peningkatan kesadaran masyarakat menuju Indonesia hijau dan bersih; (iii) peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup; (iv) pengembangan dan perbaikan Kawasan Konservasi/Lindung untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidrologis) dan mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam serta penyelesaian masalah tumpang tindih dan konflik penggunaan dan hak kepemilikan tanah ulayat antara kepentingan lindung dan budidaya; (v) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang sehat melalui penertiban pembuangan sampah dan limbah-limbah industri, sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko efisiensi pada berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi, peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam penanganan sampah terutama sampah perkotaan dan pendirian perusahaan TPA, dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut; dan (vi) peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut dalam bentuk konservasi

dan rehabilitasi ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria.

- c) Pembangunan sumber daya kehutanan yang diarahkan pada: (i) Penertiban perambahan, penebangan liar dan perdagangan ilegal hasil hutan; (ii) Revitalisasi sektor kehutanan untuk mendorong pertumbuhan sektor kehutanan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan pengelolaan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian perbaikan kualitas lingkungan hidup; (iii) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan melalui penertiban dan pemeliharaan keutuhan ekosistem hutan dan fungsinya, perlindungan terhadap flora dan fauna langka dari perburuan liar, penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hutan; dan (iv) pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja yang kondusif dan efektivitas pengawasan.
- d) Pembangunan sumber daya perkebunan yang diarahkan pada: (i) peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi perkebunan; penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM aparatur dan petani, peningkatan investasi, peningkatan kualitas pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan sentra pembibitan dan pengawasan sertifikasi benih/bibit; (ii) pengembangan mitra usaha.
- e) Pembangunan sumber daya air dan irigasi yang diarahkan pada: (i) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan DAS melalui konservasi dan rehabilitasi sumber-sumber mata air dan DAS, penertiban bangunan sekitar kawasan DAS melalui penertiban IPL/IMB, pengukuhan tapal batas sumber mata air; (ii) Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi melalui pembangunan embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya; (iii) Peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan air bersih sesuai dengan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih, pengembangan konservasi sumber air khususnya di DAS dan sumber mata air.
- f) Penanggulangan bencana yang diarahkan pada: (i) Pemetaan daerah rawan bencana; (ii) mitigasi; (iii) tanggap darurat; (iv) rekonstruksi; (v) Penguatan peran pelaku kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi peran dan fungsi instansi pemerintah terkait, potensi masyarakat dan lembaga internasional; (vi) Membangun masyarakat siaga bencana.

4.1.5. Mewujudkan Kota Ruteng sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan serta Kota Molas (Kota Asri) melalui:

- a) Pembentukan Kotamadya;
- b) Pembangunan Kesehatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan melalui peningkatan Tipe Rumah Sakit Umum Ruteng dan menjalin kemitraan dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan swasta.
- c) Pembangunan Pendidikan yang diarahkan pada Penetapan Kota Ruteng sebagai Kota Pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan menengah dan tinggi yakni pembangunan lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan; mendorong dan memfasilitasi pembangunan universitas atau perluasan/penambahan jurusan pada Perguruan Tinggi yang ada; pembangunan lembaga pendidikan formal bertaraf internasional; dan pengembangan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar masyarakat sepanjang hayat.
- d) Pembangunan Perdagangan dan Industri yang diarahkan pada peningkatan perluasan sarana perdagangan melalui pengembangan pusat-pusat perbelanjaan dan industri berskala menengah ke atas.
- e) Pembangunan Kota Ruteng yang diarahkan pada penataan Kota Ruteng sebagai *kota molas* (kota asri) berdasarkan filosofi yakni kesempurnaan budi dan lingkungan melalui : (i) pembangunan taman kota dengan tanaman hias dan kayu pelindung spesies lokal seperti kayu Manis (Ndingar), Munting Rona (untuk dataran tinggi), kayu Labe Hang, dan sebagainya berdasarkan blok wilayah; (ii) Pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk pusat-pusat pembangunan; (iii) Revitalisasi kampung-kampung tradisional agar tetap ada sebagai pusat budaya; (iv) tersedianya taman kota, kawasan hijau dan alun-alun kota dengan konsep kota taman (*garden city*).

4.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2005-2025

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Manggarai memerlukan tahapan dan prioritas yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Manggarai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan. Kendatipun tekanan prioritas dalam setiap RPJMD Kabupaten

Manggarai berbeda-beda, tetapi semua hal tersebut harus mengungkapkan karakter pembangunan yang berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Manggarai dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperinci kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar hal tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut:

4.2.1. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 (I).

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 (I) diarahkan untuk menata kembali pembangunan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai secara adil dan merata yang diridhoi Tuhan yang Maha esa.

Untuk mengaktualisasikan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 menetapkan 5 (Lima) Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010 atau disebut dengan **PANCA PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN MANGGARAI 2005-2010** yaitu :

1. Agenda meningkatkan perekonomian masyarakat Manggarai;
2. Agenda meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Manggarai;
3. Agenda mewujudkan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu;
4. Agenda mewujudkan perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup; dan
5. Agenda mewujudkan supremasi hukum dan hak azasi manusia.

Kelima Agenda tersebut di atas selanjutnya dikenal dengan nama **KON-SE-P BER-SIH**.

Agenda Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Manggarai merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bidang ekonomi. Indikator capaiannya ialah terciptanya lapangan kerja, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Agenda meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Manggarai merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai untuk menciptakan dan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator capaiannya ialah meningkatnya

usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan TFR, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatnya status gizi balita.

Agenda mewujudkan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai untuk membentuk karakter SDM yang cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Indikator capaiannya ialah meningkatnya penduduk yang mengenyam pendidikan, meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, meningkatnya rasio guru/murid dan guru/sekolah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Agenda mewujudkan perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Indikator capaiannya ialah berkurangnya lahan kritis dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan.

Agenda mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai untuk mewujudkan supremasi hukum dan penegakan HAM. Indikator capaiannya ialah menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan keuangan daerah; meningkatnya jumlah produk hukum daerah baik yang bersifat mengatur maupun yang menetapkan; meningkatnya jumlah sertifikasi tanah perorangan demi terjaminnya kepastian hukum atas tanah; menurunnya kasus perdata; penyelesaian masalah tanah; penerbitan dan Pendistribusian Buku Himpunan Lembaran Daerah dan Lembaran Daerah Lepas ke setiap Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan, Desa/Kelurahan; dan sebagainya.

4.2.2. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 (II).

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2010, RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 (II) ditujukan untuk lebih memantapkan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Manggarai pada segala bidang dengan menitikberatkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing perekonomian.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditujukan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesejahteraan dan kemajuan masyarakat terus ditingkatkan yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang berkualitas; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu; pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di sentra-sentra produksi.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri pengolahan berskala mikro dan menengah sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas pendidikan non-formal; dan penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat pedesaan dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi panas bumi Ulumbu; pengembangan sumber daya air, pengembangan perumahan dan permukiman.

Kondisi keamanan dan ketertiban sosial terus ditingkatkan yang ditandai menurunnya konflik dan angka kriminalitas serta meningkatnya kesadaran hukum. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan kelanjutan penataan sistem hukum daerah. Sejalan dengan itu, kehidupan politik yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan Partai Politik. Selain itu, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel terus ditingkatkan, yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada setiap SKPD dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai: berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan

bencana; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.3. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020 (III).

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM Kabupaten Manggarai tahun 2010-2015 (II), RPJM Kabupaten Manggarai Tahun 2010-2015 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang kehidupan manusia dengan penekanan pada pencapaian perekonomian yang kompetitif berlandaskan pada keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas.

Upaya peningkatan IPM Manggarai terus digalakan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; terlestarnya seni dan budaya Manggarai.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat terus dilaksanakan yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan semakin terintegrasinya sektor tersier, sekunder dan sektor primer secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh sinergisitas pemerintah dan dunia usaha, pembangunan pendidikan disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja, penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga kelanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin meningkat dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat; serta semakin baiknya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

4.2.4. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2025 (IV).

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan sebagai kelanjutan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2015-2020 (III), RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2025 (IV) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Manggarai yang sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan pada pelbagai bidang kehidupan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing semakin signifikan yang ditandai oleh peningkatan dan pemerataan akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; terwujudnya kesetaraan gender; dan bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat makin baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditandai oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial

yang lebih menyeluruh; struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk yang miskin makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujudlah kota tanpa permukiman kumuh.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya sistem hukum daerah yang akomodatif; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang maju dan adil.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa depan.